

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala aktivitas berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas berbagai sumber daya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk, menurut Todaro adalah termasuk aktivitas pembangunan. Sumber daya dimaksud meliputi modal, manusia maupun sumber daya potensial seperti teknologi (Mentor, 2013). Setiap negara menginginkan kondisi perekonomiannya stabil dan mampu tumbuh sehingga tujuan pembangunan yang dilakukan dapat tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menggunakan alternatif kebijakan ekonomi tergantung pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Salah satu kondisi yang ingin dicapai adalah tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Dalam kondisi ini pengangguran dapat ditekan serendah mungkin oleh pemerintah sehingga masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dan kemampuan yang dimiliki (Suparmono, 2018). Selama bertahun-tahun, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan penduduk telah dianggap sebagai dua faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan tingkat produksi, dan peningkatan ukuran pasar domestik akan menghasilkan peningkatan penawaran tenaga kerja (Purba, 2020).

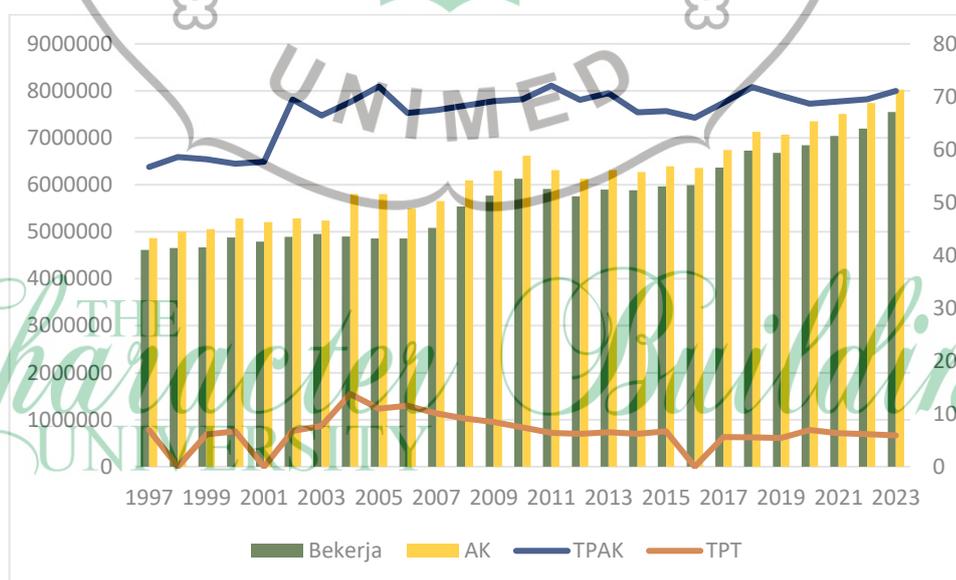
Tenaga kerja berperan utama dalam pembangunan nasional, baik sebagai subjek pelaku maupun sebagai objek yang ditata dalam aktivitas pembangunan

nasional itu sendiri. Hal tersebut merupakan amanat dari regulasi ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal itu menyebabkan pembangunan ketenagakerjaan harus selalu menjadi perhatian utama. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sangat diperlukan agar dapat mengimbangi laju peningkatan jumlah orang yang memasuki pasar tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, jumlah penduduk yang tinggi dan tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah yang sama akan menimbulkan tingginya angka pengangguran. Dampak lanjutan menurut (Ishak, 2007), tentu ke arah tidak efisiennya sumber daya maupun potensi angkatan kerja, semakin beratnya beban masyarakat, memicu jumlah masyarakat miskin dan peningkatan angka kriminalitas serta secara jangka panjang menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi. Ini pun selaras menurut pendapat (Warapsari et al., 2020), kemiskinan yang terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat adalah dampak dari oleh keterbatasan jumlah kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat usia kerja.

Tingginya pengangguran, produktivitas yang rendah, besarnya jumlah pekerja sektor informal, serta lambatnya pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja sehingga belum dapat mengimbangi pertumbuhan angka kerja, merupakan rangkuman kondisi yang terjadi di dunia ketenagakerjaan negara ini. BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,8 juta jiwa ditahun 2023 meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 275,77 juta jiwa. Wilayah Provinsi Sumatera Utara utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023 berada di

peringkat ke-4 dan tercatat memiliki jumlah penduduk 15.471.582 jiwa meningkat dibanding tahun sebelumnya 15.31 juta jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 7.874 juta jiwa dan kondisi ini menempatkan Sumatera Utara urutan ke-9 yang tingkat pengangguran tertinggi nasional sebesar 5,89% pada bulan agustus 2023. Penduduk yang besar ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang signifikan di sektor perekonomian dari sisi sumber daya manusia. Namun, kondisi ini menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan yang seimbang dan kebutuhan peningkatan ketrampilan angkatan kerja. Atas dasar itu, tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan di Sumatera Utara yang ideal merupakan suatu kebutuhan.

Gambar 1 1 Keadaan Tenaga Kerja Sumatera Utara 1997-2023



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.1 mengungkapkan fluktuasi penyerapan tenaga kerja tahunan dari status penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan

tenaga kerja setiap tahun masih jauh dari optimal. Meningkatnya tenaga kerja ini dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk. Tercatat bahwa, pada tahun 2004 tingkat penyerapan tenaga kerja atau TPT adalah paling rendah jika mengacu pada angka tingkat persentase pengangguran terbuka pada angka 13,75%. Sedangkan untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 angka TPT berkisar di angka 6 persen. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun yang lalu, namun jika dilihat dari angka capaian target RPJMN pada kisaran 3,6 – 4,3 persen ternyata masih tergolong tinggi. Untuk itu perlu sangat diperlukan evaluasi dan tindak lanjut yang lebih baik dari pemerintah.

Meskipun kondisi ketenagakerjaan mengalami peningkatan tiap tahun namun perlu disadari masih ada celah yang cukup lebar antara angkatan kerja dan penduduk yang bekerja dan hal ini belum cukup baik untuk mendorong perekonomian yang lebih maju. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan masih belum mampu mengimbangi ketersediaan angkatan kerja. Menurut Mulyadi, ketidakseimbangan yang muncul antara variabel kebutuhan tenaga kerja di satu sisi dan variabel tenaga kerja tersedia di tingkat upah tertentu di sisi lainnya akan memunculkan masalah di bidang ketenagakerjaan (Mardhiyah, 2023). Sebab variabel penawaran tenaga kerja tersedia jumlahnya melebihi variabel kebutuhan tenaga kerja dari sisi jumlah. Tentu saja ini memerlukan upaya dan tindakan yang dapat membantu perluasan di sektor kesempatan kerja.

Keynes menganggap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek berfokus pada permintaan agregat dan upah. Keynes berargumen bahwa dalam kondisi di mana permintaan agregat rendah, perusahaan cenderung tidak mempekerjakan

lebih banyak tenaga kerja, meskipun ada tenaga kerja yang bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Ketika permintaan meningkat, perusahaan akan merespons dengan meningkatkan produksi, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi penurunan. Sedangkan dalam durasi yang panjang penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh Akumulasi modal (Mulyadi, 2014).

Menurut Todaro, Pertumbuhan ekonomi disokong oleh tiga faktor yaitu yang pertama sumber daya manusia, lalu akumulasi modal dan teknologi (Fatmawati & Syafitri, 2015). Dari sudut pandang Sumber Daya Manusia, perkembangan penduduk dapat menambah banyaknya tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan pasar domestik. Selain itu, faktor modal terakumulasi meliputi investasi dalam bentuk tanah, modal, maupun sumber daya manusia. Kesemuanya ini punya pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Dan terakhir, faktor teknologi mencakup aspek kemajuan teknologi khususnya yang berdampak langsung ke bidang ekonomi dan bisnis (Wahyudi, 2022). Pada akhirnya, peningkatan jumlah penduduk menghasilkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja dalam proses produksi. Selain itu, pandangan Harrod-Domar yang merupakan pengembangan dari pemikiran Keynes, menyatakan bahwa permodalan atau investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, yang berarti penyerapan angkatan kerja dapat dicapai (Sukirno, 2016). Namun, investasi dengan tingkat

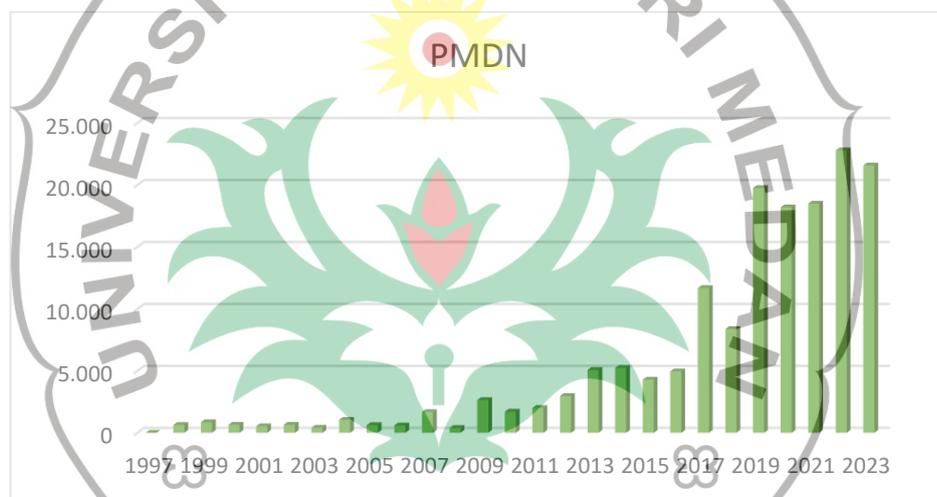
bunga yang tinggi sebagai akibat dari kenaikan harga barang secara umum akan menyebabkan lebih sedikit kesempatan kerja dan menyebabkan banyak pengangguran. Selain itu, untuk memperbaiki kondisi perekonomian menuju kesejahteraan penuh, yang berarti lebih banyak kesempatan kerja dapat dicapai melalui peningkatan pembelanjaan atau pengeluaran, yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa melalui peningkatan pengeluaran seluruh rumah tangga, penanaman modal oleh pengusaha, dan ekspor.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi daya serap angkatan kerja, termasuk faktor investasi atau penanaman modal/ekuitas. Diperlukan ekuitas modal yang besar untuk membuat ekonomi tumbuh meningkat secara berkelanjutan. Dengan investasi yang meningkat, akan memicu peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Adanya Investasi dapat membantu mengumpulkan modal untuk mendirikan bisnis baru atau memperbaiki dan meningkatkan bisnis yang sudah ada. Investasi bisa memperkuat daya serap domestik, meningkatkan pendapatan per orang, mengurangi tingkat kemiskinan, menaikkan pendapatan per kapita, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prasojo (Hidayah et al., 2016), Kehadiran Penanaman Modal Dalam Negeri dengan memfasilitasi terbentuknya *working capital* baru, akan mendorong terciptanya faktor produksi dan tentunya ini membuat terbentuknya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Menurut pendapat (Awandari & Indrajaya, 2016), Investasi terkait erat dengan penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini karena investasi mengarah pada peningkatan aktivitas produktif, menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan yang diperlukan. Hasil penelitian (Sabihi

et al., 2021) PMDN berpengaruh negatif signifikan dalam proses menyerap angkatan kerja di kota Manado. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Harrod-Domar dengan teori keberadaan investasi dapat menyerap tenaga kerja.

Gambar 1.2 Realisasi PMDN Sumatera Utara 1997-2023



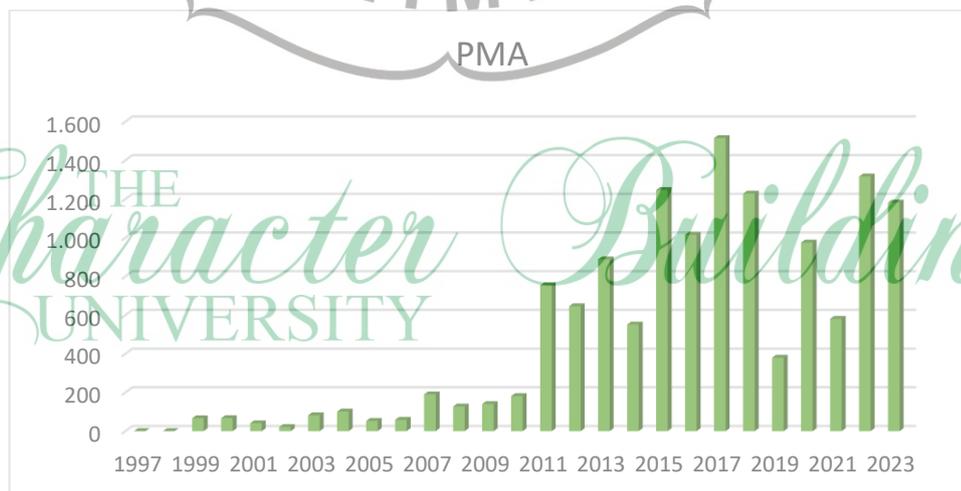
Sumber : BPS Pusat, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa realisasi PMDN 1997-2022 mengalami situasi yang berfluktuatif, terjadi naik dan turun setiap tahunnya. Nilai Investasi PMDN di Sumatera Utara yang terendah terindikasi terjadi di tahun 1997 dengan realisasi sebesar 21.491 miliar rupiah. Dan realisasi tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 22.789,2 miliar rupiah. Kenaikan jumlah realisasi PMDN ini menunjukkan bahwa kondisi penanaman modal dalam negeri sudah meningkat dari sebelumnya mengingat letak Sumatera Utara memiliki potensi yang mumpuni.

Di sisi lain Penanaman Modal Asing juga sebagai komponen tambahan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Menurut Greenaway, Morgan, dan

Wright (Ningrum, 2008), investasi asing di negara berkembang memberi penganggur di negara berkembang lapangan kerja. Menurut Kairupan (Jamil & Hayati, 2020), pertumbuhan nasional akan cukup efektif jika didukung oleh penanaman modal. Ini terutama berlaku untuk pembangunan sektor riil, yang akan menghasilkan banyak kesempatan kerja. Sejalan dengan apa yang dikatakan Haryanto, bahwa peningkatan investasi mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan mengurangi angka pengangguran (Mardhiyah, 2023). Besaran jumlah investasi asing juga dapat menjadi tambahan modal bagi perusahaan. Sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada terciptanya ketersediaan lapangan kerja baru bagi para tenaga kerja dengan penyerapan yang baik (Adityaputri, 2022).

Gambar 1 3 Realisasi PMA Sumatera Utara 1997-2023



Sumber : BPS Pusat, 2023

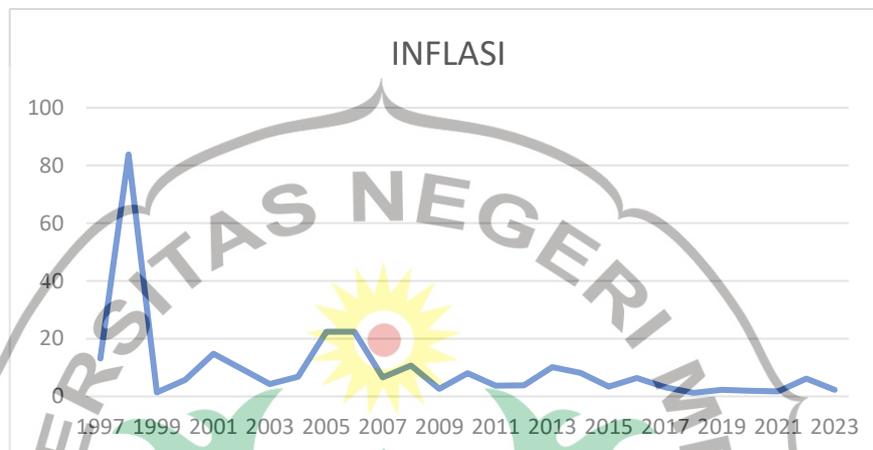
Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa perkembangan realisasi PMA juga naik-turun setiap tahunnya. PMA tertinggi terjadi tahun 2023 sebesar

1.181,30 juta US\$ dan terendah pada tahun 1998 sebesar 1.593 juta US\$. Penanaman Modal Asing (PMA) cenderung naik turun setiap tahunnya dikarenakan lokasi strategis wilayah Sumatera utara yang berpotensi untuk tumbuh pesat sehingga menungudang para investor asing untuk berinvestasi dan tentunya dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan mudah.

Di sisi lain, inflasi juga menjadi faktor lain yang punya pengaruh pada kondisi ketenagakerjaan. Selain berpengaruh pada kinerja daya serap bidang ketenagakerjaan dan juga berdampak pada stabilitas ekonomi. Menurut Sukirno, Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi output dan kesempatan kerja, yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Namun, meningkatnya produksi barang serta jasa akan menumbuhkan permintaan faktor produksi yaitu tenaga kerja (Nofrita & Marwan, 2022).

Menurut Indradewa & Natha (2015) dikatakan bahwa jika inflasi tinggi, faktor-faktor produksi menjadi tidak terjangkau dan perusahaan-perusahaan akan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja. Sebaliknya, jika inflasi rendah, perusahaan akan berusaha meningkatkan produksi. Hal ini dikarenakan kenaikan harga masih dapat dijangkau oleh produsen dan adanya tambahan permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap ketenagakerjaan. Namun juga ditemukan dampak positif dalam sebuah kasus, dibuktikan dalam penelitian (Nofrita & Marwan, 2022) bahwasanya di Sumatera Barat, kenaikan inflasi berpengaruh positif pada kinerja daya serap tenaga kerja. Berikut ini gambaran kondisi inflasi Sumatera Utara.

Gambar 1 4 Perkembangan Inflasi Sumatera Utara 1997-2023



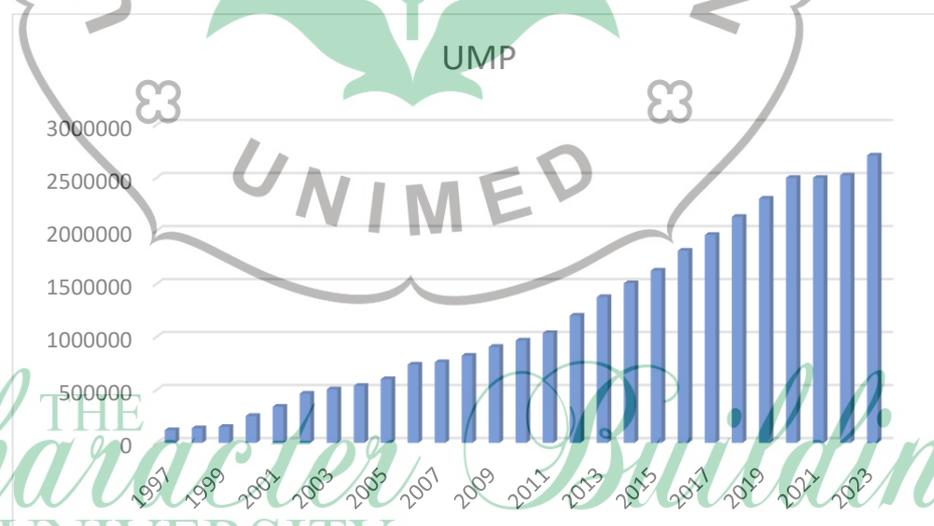
Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

Perkembangan inflasi dari tahun 1997 hingga 2023 mengalami fluktuasi.. Inflasi tertinggi terjadi di tahun 1998 dikarenakan adanya krisis moneter yang menyebabkan harga-harga barang menjadi naik drastis. Dan inflasi juga meningkat di tahun 2005 dan 2006 sebesar 22,41% yang dipicu oleh kebijakan peningkatan harga BBM sampai 100% yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tajam harga pasar untuk barang maupun jasa, termasuk kebutuhan sehari-hari juga mengalami peningkatan harga yang tajam. Dan penurunan inflasi terjadi di tahun 2018 dikarenakan stabilnya harga komoditas bahan makanan terutama cabai merah. Berfluktuasinya Inflasi disebabkan oleh peningkatan harga komoditas seperti komoditas konsumsi, air dan produk lainnya. Untuk itu Pemprov Sumatera utara dan BI berupaya menjaga kestabilan harga melalui program dalam TPID dengan fokus harga yang terjangkau, pasokan lancar tersedia, distribusi lancar dan efektif di sisi komunikasi.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah Sumatera Utara menerapkan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan tingkat upah

yang diterima masyarakat. Kondisi UMP meningkat setiap tahun karena merupakan dasar negara untuk menentukan upah minimum regional. Tingkat upah sebagai faktor yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Permintaan penggunaan tenaga kerja akan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya tingkat upah yang ditetapkan pemerintah (Neumark & Wascher, 2007). Menurut Sukirno, baik penawaran maupun permintaan tenaga kerja **memengaruhi** upah untuk jenis pekerjaan tertentu. Jika banyak tenaga kerja tetapi sedikit permintaan, upah cenderung lebih tinggi (Mardhiyah, 2023). Berikut ini grafik perkembangan UMP di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1 5 Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara 1997-2023



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023

UMP di Provinsi Sumatera Utara tahun 1997-2023 cenderung meningkat tiap tahunnya. Upah Minimum tertinggi terjadi di di tahun 2023 sebesar 2.710.493 rupiah. Adanya Kenaikan Upah Minimum dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menggerakkan masyarakat mencari kerja dan tentu akan meningkatkan penyerapan angkatan kerja.

Menurut Mankiw (2006) dari sudut pandang penawaran tenaga kerja, penyerapan angkatan kerja secara positif dipengaruhi oleh upah. Kenaikan tingkat upah tidak mengurangi lapangan kerja, karena hal ini meningkatkan produktivitas pekerja, mempengaruhi output yang dihasilkan dan mengurangi biaya produksi yang ditanggung perusahaan. Sebaliknya, permintaan tenaga kerja akan menurun karena upah yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi perusahaan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa peningkatan angkatan kerja Sumatera Utara bisa disebabkan oleh tingkat inflasi, peningkatan nilai investasi, serta kenaikan UMP. Penurunan daya serap tenaga kerja diduga terjadi karena penurunan produksi akibat inflasi tinggi, menurunnya investasi, dan UMP yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi adanya inkonsistensi hasil dari faktor-faktor berpengaruh dalam daya serap tenaga kerja khususnya terkait dengan PMDN, PMA, Inflasi serta Upah. Kondisi serapan lingkup tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 1997-2023 menunjukkan naik-turunnya serapan tenaga kerja dari tahun ke tahun masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengingat Sumatera Utara sebagai sebuah provinsi besar, memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan bertambah setiap tahunnya. Hal ini menarik perhatian penulis dalam menjadikan topik ini sebagai objek penelitian dengan fokus di Sumatera Utara, terkait gambaran pengaruh investasi baik PMDN maupun PMA, tingkat inflasi dan tingkat upah terhadap kinerja daya serap tenaga kerja di Sumatera Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan di Sumatera Utara sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja belum terserap dengan baik setiap tahunnya.
3. Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA masih belum mencapai target.
4. Perkembangan Inflasi masih terjadi fluktuasi setiap tahunnya.
5. Perkembangan Upah Minimum Provinsi belum memberikan kepuasan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Mempertimbangkan segala keterbatasan peneliti, maka penelitian ini peneliti batasi oleh hal-hal berikut:

1. Objek yang diteliti yaitu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1997-2023
2. Variabel yang digunakan yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PMA (Penanaman Modal Asing), Inflasi dan Upah Minimum Provinsi.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu paparan di latar belakang sebelumnya, peneliti menyusun rumusan masalah dalam urutan berikut:

1. Bagaimana PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dapat mempengaruhi Jumlah Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk jangka panjang maupun jangka pendek?
2. Bagaimana PMA (Penanaman Modal Asing) dapat mempengaruhi Jumlah Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk jangka panjang maupun jangka pendek?
3. Bagaimana Inflasi dapat mempengaruhi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara dalam jangka panjang dan jangka pendek?
4. Bagaimana Upah Minimum Provinsi dapat mempengaruhi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara dalam jangka panjang dan jangka pendek?
5. Bagaimana pengaruh PMDN, PMA, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada poin-poin rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang
2. Untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Untuk mengetahui pengaruh PMDN, PMA, Inflasi dan Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan dan aplikasi Ilmu Ekonomi, khususnya untuk lingkup Ketenagakerjaan. Harapan peneliti, hasil penelitian dapat memberi kontribusi informasi serta wawasan ilmu pengetahuan tambahan mengenai pengaruh PMDN, PMA, Inflasi dan UMP

terhadap Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk jangka panjang dan jangka Pendek.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dimaksudkan untuk mampu menambah wawasan dan pengalaman tentang pengaruh PMDN, PMA, Inflasi dan UMP dalam dunia ketenagakerjaan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini layak dimanfaatkan untuk bahan referensi perpustakaan, serta sebagai acuan perbandingan untuk penelitian serupa, terutama terkait pengaruh PMDN, PMA, Inflasi, dan UMP terhadap Daya Serap Tenaga Kerja di Sumatera Utara.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan masukan agar lebih mencermati masalah ketenagakerjaan dengan lebih serius, di sisi lain diharapkan mampu memberi manfaat juga dalam penentuan kebijakan,

baik dalam PMDN, PMA, Inflasi dan juga UMP.